

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG
TUA KANDUNG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Polsek Bontomarannu Gowa)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FADJRIANA BURHANUDDIN

Nim:10200114191

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADJRIANA BURHANUDDIN
Nim : 10200114191
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 04 Oktober 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Perm.Green Cakra Residence Blok I/14 Taeng, Kab.
Gowa
Judul : **Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Oleh
Orang Tua kandung Prespektif Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus di Polsek Bontomarannu Gowa)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Agustus 2018

Peneliti

FADJRIANA BURHANUDDIN
NIM : 10200114191

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Polsek Bontomarannu Gowa)”, yang disusun oleh Fadjriana Burhanuddin, NIM: 10200114191, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 M, bertepatan 15 Dzulhijjah 1439 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Samata, 28 Agustus 2018 M

16 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M. Hum.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Kurniati, M.H.I	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Alimuddin, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hamzah Hasan, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Hj. Rahmiati, M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum

UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Nip: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil Alamiin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya skripsi yang merupakan tugas akhir dari perkuliahan ini dapat peneliti rampungkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (SI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Dengan rampungnya skripsi ini, besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Ucapan maaf dan terima kasih yang tidak terhingga atas partisipasi para pihak yang telah berjasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Teruntuk kepada orang tua saya **Ibunda ST. Sohrah** sebagai motivator terbesar yang tidak hentinya bekerja keras dan berdoa demi kelanjutan studi putrinya.

Ucapan terima kasih juga peneliti ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Prof.Dr. Darussalam Syamsuddin, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Dr. Kurniati, M.Hi, selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan selama masa studi.
5. Bapak Dr. Hamzah Hasan, M.Hi, selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir Peneliti yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Ibu Hj. Rahmiati, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir Peneliti yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, motivasi dan dukungan selama masa studi.
7. Ibu Dr. Kurniati, M.Hi selaku Dosen penguji I yang memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Bapak Dr. Alimuddin, selaku Dosen Penguji II yang memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Seluruh dosen dan staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
10. Kepada kedua orang tua saya Burhannuddin S (Alm) dan ST. Sohrah yang telah menekankan mengenai pentingnya pendidikan dan menghargai ilmu, memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah putus dan juga telah memberikan kepercayaan yang amat besar bagi Peneliti. Untuk ayah tercinta, ini adalah salah satu mimpimu yang terwujud melihat sang Peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya.
11. Kepada saudara-saudara penulis yang tidak pernah memberikan Peneliti semangat dalam menyelesaikan pendidikan demi kelancaran studi.

12. Terimakasih kepada Kepolisian Sektor Bontomarannu Gowa, khususnya bagian Reskrim dan Kasium yang telah membantu Peneliti dalam memperoleh data penelitian.
13. Keluarga besar SMAN 10 Sinjai, yang memberikan motivasi dan dorongan beserta saran dan kritikan dalam penyusunan tugas akhir ini.
14. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), khususnya pengurus angkatan 2014/2015 yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.
15. Keluarga besar Mahasiswa Berpendidikan Hukum (MBH), yang selalu memberikan dukungan selama ini.
16. Sahabat-sahabatku Syahruni, Novi Elisa Ramli, Ulan Handari, Devi Yuliana Ashar dan Herlina Amir yang selalu memberikan semangat dan setia menemani Peneliti dalam menyelesaikan studinya.
17. Teman kelas sekaligus teman seperjuanganku, Rikki Reski A, Aksan Syafrizal dan Fajrim Hairul yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.
18. Teman-teman seperjuangan 2014 terkhusus HPK D dan teman-teman yang lain yang tidak sempat disebutkan namanya, terima kasih telah memberikan saran dan semangat kepada Peneliti selama ini.
19. Teman teman seperjuangan di KKN Angkatan 58 Kabupaten Maros Kecamatan Samangki dan terkhusus kepada teman-teman posko Dusun Tanrang, Nur Anni'zar Kadir, Wahyuni, Sahdiah Desriana Karim, Zulkarnain, Faizal Zaman, Haris Reski Pratama dan Furgan Eka Sakti.

20. Terima kasih kepada Guru-guru yang pernah mengajar Peneliti, Skripsi ini adalah bentuk terima kasih dan penghargaan tertinggi penulis atas jasa-jasa para guru selama ini.

21. Terima kasih kepada segenap orang-orang yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya. Terima kasih sebesar-besarnya. Jerih payah kalian sangat berarti.

Demikian yang dapat Peneliti sampaikan. Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apa bila dalam penulisan ini terdapat banyak ketidak sempurnaan. Olehnya, penyusun menerima kritik dan saran pembaca sebagai acuan penulis agar lebih baik lagi di penulisan selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 14 Agustus 2018

Peneliti

FADJRIANA BURHANUDDIN

DAFTAR ISI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12

BAB II TINJUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	20
C. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam	28
D. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Sumber Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
G. Pengujian Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	46
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan Terhadap Anak oleh Orang Tua Kandung	59
C. Hambatan yang Dihadapi Penyidik dalam Menyelidiki Kasus Pembunuhan Terhadap Anak oleh Orang Tua Kandung.....	62
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Kandung.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Implikasi Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah</i> dan yā'	ai	a dan i
آَوْ	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>fathah</i> dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
آِ	<i>kasrah</i> dan yā'	i	i dan garis di atas
آَوْ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Nama : Fadjriana Burhanuddin
Nim : 10200114191
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi kasus di Polsek Bontomarannu Gowa)

Skripsi ini membahas mengenai Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anak oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi kasus di Polsek Bontomarannu Gowa). Adapun pokok masalah adalah bagaimana pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung?, Apa saja hambatan yang dihadapi penyidik dalam menyelidiki kasus pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung? Dan Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung?.

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggabungkan antara Penelitian teologi Normatif Syar'i dan Penelitian Yuridis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data *Field research* kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari penyidik yang dilakukan di POLSEK Bontomarannu Gowa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung adalah: meminum minuman keras, faktor lingkungan dan faktor agama. 2). Hambatan yang dihadapi penyidik: mencari keberadaan pelaku yang melarikan diri, Kurangnya kesadaran hukum warga, keterangan saksi-saksi bersifat tertutup dan keterangan pelaku berubah-ubah. 3). tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung adalah pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung yang hukum dan sanksinya telah tegas di tentukan dalam al-Qur'an dan Hadist.

Implikasi dari penelitian adalah: 1). Diharapkan kepada masyarakat bertanggung jawab dalam berumah tangga. 2). Melihat hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik maka perlu ditingkatkan sosialisasi terhadap warga tentang pentingnya keterbukaan pada saat menjadi saksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah keluarga atau kerabat dekat korban, dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, pendidikan yang rendah dan faktor psikologis seseorang.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain,¹ sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

¹Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi* (Raja Grafindo Persada, cet: 10, 2011), h.3

Istilah hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk merujuk pada sistem norma yang sedang berlaku di Indonesia atau yang sering disebut hukum positif Indonesia. Secara sistematis berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-unsur, sub-sistem atau elemen-elemennya yang berkaitan, saling mempengaruhi serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dipisahkan.

Sebagai suatu sistem, Hukum Indonesia terdiri atas sub-sistem atau elemen-elemen hukum yang beraneka antara lain *Hukum Tata Negara* (yang bagian-bagiannya terdiri Hukum Tata Negara dalam arti sempit Hukum Tata Pemerintahan), *Hukum Perdata* (yang bagian-bagiannya terdiri atas Hukum Perdata dalam arti sempit, Hukum Acara Perdata dan Hukum Dagang atau Hukum Bisnis), *Hukum Pidana* (yang bagian-bagiannya terdiri dari Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Ekonomi serta Hukum Acara Pidana) serta *Hukum Internasional* (yang terdiri atas Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional.² Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang

²Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 6.

melanggar larangan tersebut.³ Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat moral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.⁴

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana Pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat. Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan UUDNRI 1945 Pasal 28A yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁵ Apabila di lihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat “KUHP” yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku

³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 1.

⁴H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II* (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 6.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.⁶ Maka penegakan huku merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukun sebagai suatu usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja), antara lain Aparatur Negara, Pengacara, Para Eksekutif dan masyarakat pengguna jasa hukum.⁷

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat. Dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sangat memperhatikan masyarakat. Tuhan menitipkan anak kepada orang tua untuk dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga 'titipan' itu. Maka sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menjaga amanah itu.

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanah Allah yang wajib ditangani secara benar.⁸ Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apa pun yang diinginkan dan corak maupun yang diinginkan.

⁶P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012), h. 11.

⁷Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 128.

⁸M Niphan Abdul Halim, *Membahagikan Suami Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra pustaka, 2005), h. 361.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁹ Maka disahkanlah Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak.

Namun, beberapa kasus tidak jarang orang tua dengan tega bertindak kasar, bahkan sampai menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Dengan berbagai motif, orang tua tega memperlakukan darah dagingnya secara tidak manusiawi. Sedangkan anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang *dhaif* (lemah) dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah swt.¹⁰

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan

⁹Maidin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: P.T.Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2010), h. 39.

¹⁰Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: gramedia wirasarana indonesia, 2000), h. 5-6.

memelihara manusia seluruhnya.¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah/5: 32 :

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya :

“oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”¹²

Hukum Islam memberikan ketentuan hukum bahwa orang tua yang membunuh anaknya tidak dijatuhi hukuman *qisas* karena hukuman tersebut menjadi gugur apabila yang dibunuh adalah bagian (juz) dari orang yang membunuh.¹³ Sedangkan hukum positif di Indonesia dalam menangani kasus tersebut memberikan ketentuan yang berbeda bahkan berseberangan yaitu memberikan hukuman 1/3 (sepertiga) lebih berat dibandingkan dengan yang membunuh adalah bukan orang tuanya.¹⁴

¹¹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2003), h. 71-72

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2009), h. 113

¹³Abdul Qadir al-Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Muasasah al-Risalah, tt), h. 213.

¹⁴UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 80

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai penyelesaian perkara pidana pembunuhan dengan pelaku orang tua kandung. Penelitian ini dikemas dalam judul **“TINDAK PEMBUNUHAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS POLSEK BONTOMARANNU KAB. GOWA)**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada proses penyidikan pidana pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung perspektif hukum pidana islam(studi kasus di Polsek Bontomarannu Gowa).

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian yang dianggap penting, yaitu:

Fokus	Deskripsi
Tindak pidana pembunuhan	Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu <i>Strafbaar feit</i> atau <i>Delict</i> , yang berarti kelakuan atau tingkah dan kesalahan orang yang mengadakan kesalahan tadi. ¹⁵ Sedangkan definisi

¹⁵Abdul Rahman Kanang, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Konstitusional anak* (Makassar, Alauddin University Press, 2011), h. 45

	<p>tentang pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyebabkan seseorang mati.¹⁶ Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan menyimpang yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa.</p>
Anak	<p>Pengertian anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan dari keduanya.¹⁸ Sedangkan menurut UU RI No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan.”¹⁹ Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah.²⁰ Dari penjelasan tersebut dapat</p>

¹⁶Nanda Yunisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Victory Inti Cipta, 2017), h. 169

¹⁷Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 569

¹⁸Nanda Yunisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Victory Inti Cipta, 2017), h. 35

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.3

²⁰Abdul Rahman Kanang, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*. (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 39

	simpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap 18 tahun sekalipun masih dalam kandungan yang membutuhkan perlindungan dari orang tuanya.
Hukum Pidana Islam	Hukum pidana adalah hubungan antara pemerintah dengan pihak perorangan atau badan hukum, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh polisi penyidik atau penyelidik, penuntut umum (jaksa) dan hakim pemutus perkara atau hakim vonis. ²¹ Jadi hukum pidana islam adalah penjatuhan hukuman terhadap suatu tindak kriminal berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah “bagaimana pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung” dengan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam menyelidiki kasus tindak pidana pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung ?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung

²¹M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Siar Grafika, 2016), h. 72.

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut :

1. Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, buku ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejahatan, penjelasan mengenai unsur-unsur kejahatan serta perbedaan unsur objektif dan subjektif. Temuan yang menarik pada buku ini adalah bahwa semua tindak kejahatan akan mendapatkan sanksi termasuk pembunuhan.
2. Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam* secara khusus membahas berbagai permasalahan dalam hukum pidana Islam, mulai dari paradigma negatif terhadap hukum Islam dengan menggambarkan hukum pidana Islam secara utuh.
3. Zuleha dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana*, adapun buku ini bermaksud mengidentifikasikan serta menguraikan perihal-perihal penting terkait dasar-dasar ketentuan hukum pidana, mengantarkan pembaca untuk memahami hukum pidana materil dimulai dari asas-asas hukum sampai pada ketentuan gugurnya menuntut dan melaksanakan pidana.
4. Beniharmoni harefah dalam bukunya *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, buku ini menjelaskan secara mendalam tentang isu-isu penting dalam upaya perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan hukum bagi

anak penyalahguna narkoba, perlindungan hukum bagi pekerja anak, perlindungan hukum bagi anak korban trafficking, perlindungan hukum anak korban kekerasan di sekolah, perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan pornografi, perlindungan hukum bagi anak dalam peradilan pidana, perlindungan hukum bagi anak dalam peradilan pidana, perlindungan hukum bagi anak yang dilibatkan dalam aksi teror, akan diulas baik dari sisi normatif dipadukan dari sisi praktis.

5. Ahmad Hanafi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal utama yang dikaji mengenai pembunuhan didalam hukum islam. Didalam bukunya dijelaskan bahwa adanya pembagian dari jenis-jenis pembunuhan yang terdiri dari pembunuhan sengaja yang diancam dengan hukuman *qisas* dan pembunuhan tidak sengaja yang diancam dengan hukuman *diyat*. Pada dasarnya, tindak pidana pembunuhan yang dibahas didalam buku ini adalah tindak pidana pada umumnya terlepas dari faktor pelaku ataupun korbannya apakah ada hubungan keluarga atau tidak.
6. Sebuah buku yang berjudul *Pidana Islam di Indonesia, Peluang,Prospek dan Tantangan*. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang dibuat oleh orang-orang yang ahli pada bidangnya. Alah satunya adalah H.M Abdul Malik, tulisannya mengenai *Kejahatan Terhadap Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Didalam tulisannya ini dijelaskan bahwa ada perbedaan pendapat ulama dalam pembunuhan anak oleh orang tuanya. Pada intinya, buku ini tidak membahas secara detail mengenai apa yang

dimaksud dengan anak dan orang tua serta bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan anak itu sendiri.

7. Skripsi yang berjudul *Pembunuhan Massal Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* oleh Dodi Wahyudi Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2004. Didalam skripsi ini menjelaskan mengenai tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang pembunuhan terutama secara massal.
8. Skripsi yang berjudul *Tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif* oleh Ahmad Uluwan pada tahun 2004. Skripsi ini membahas mengenai pembunuhan, akan tetapi lebih menitikberatkan kepada pembunuhan yang subjek hukumnya adalah anak.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua kandung.
- b. Mengetahui hambatan hambatan selama proses penyelidikan kasus pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung.
- c. Mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulis skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang adanya peraturan perundang-undangan yang mengenai penyelesaian perkara pidana pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan dalam penyelesaian perkara pidana.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian pidana menurut kamus hukum adalah kriminal atau kejahatan.¹ Pengertian tindak atau perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.² Dengan kata lain, apakah *Inkonkreto*, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluat arti perbuatan pidana.³

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴ Adapun menurut Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk

¹M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 142.

²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.97.

³Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 11.

⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Cet. VIII; Jakarta: Renika Cipta, 2008), h. 59.

melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁵ Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang yang apabila dilanggarakan diancam pidana barang siapa yang melakukannya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam praktik peradilan, yang pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Setelah hal itu terbukti, hakim kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada orang itu. Berdasarkan uraian tersebut bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dala pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana. Maka unsur-unsur tindak pidana meliputi beberapa hal:⁷

- a. Perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- b. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.

⁵Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Renika Cipta, 1994), h.89.

⁶Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), h. 13.

⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.99-101.

c. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang terakhir ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.

- 1) Merujuk pada eksistensi Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 yang secara khusus diperuntukkan bagi subjek delik tertentu, yaitu seorang penjahat.⁸ Artinya pasal tersebut bisa digunakan ketika pelakunya seorang penjahat.
- 2) Mengarah kepada tempat terjadinya perbuatan pidana yang harus dilakukan di muka umum sebagaimana dalam pasal 160 KUHP.⁹
- 3) Berkaitan syarat tambahan bahwa untuk bisa disebut telah terjadi perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, pelaku tersebut harus berbuat secara sengaja.
- 4) Berkaitan dengan pemberatan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 340. Dalam pasal ini disebut telah terjadi perbuatan pidana, pelaku harus betul-betul melakukannya dengan secara sengaja dan direncanakan sebelumnya. Ketika syarat ini terbukti, maka pelaku dapat dikenai acaman pidana mati.¹⁰

3. Unsur-unsur PertanggungJawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pembedaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam suatu tindak pidana yang

⁸Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 590.

⁹Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 519.

¹⁰Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 569.

menjadi permasalahan penting yang perlu diperhatikan dan dibuktikan adalah:¹¹

- a. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*Actus Reus*)
- b. Kondisi jiwa, itikat jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens Rea*)

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.¹² Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.

¹¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 40.

¹² M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Inuversitas Islam Indonesia), h. 129.

- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, yang dimana unsur kesalahan ini dibagi menjadi dua menurut pemahaman pidana, yaitu:

- a. Kesengajaan (*Opzet/ Dolus*)

Rumus Frank berbunyi: “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.”¹³ Pada umumnya dalam ilmu pidana diajarkan 3 gradasi kesengajaan,¹⁴ yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya atau untuk menimbulkan akibat tertentu.
- 2) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij megelijkheidswustzijn*) yang terjadi apabila apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

¹³Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggung jawaban Korporasi di Indonesia* (Bandung: Utomo, 2004), h. 44.

¹⁴Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 175.

- 3) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*) adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya.

Unsur niat sebagai suatu bagian dari proses psikis yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kepribadian individu pelaku. Kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan pidana memiliki 3 unsur, yaitu:

- 1) Berupa tindakan dilarang
- 2) Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan tersesebut
- 3) Bahwa tindakan tersebut melanggar

b. Kelalaian/ Kealpaan (*Culpa*)

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kata ‘kealpaan’, seperti *recklessness*, *negligence*, sembrono, dan teledor.¹⁵ Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya.¹⁶ Bentuk kealpaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) *Bewuste Culpa*, yaitu kealpaan yang disadari. Pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi.¹⁷

¹⁵Togat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2008), h. 247.

¹⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 177.

¹⁷Togat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2008), h. 289.

- 2) *Onbewuste Culpa*, yaitu kealpaan yang tidak disadari. Pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.¹⁸

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara etimologi, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian anak adalah Oleh karena itu, jika anak belum lahir belum dapat disebut al-walad atau al-mawlud, tetapi disebut al-janin yang berarti *al-mastur* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) didalam rahim ibu. Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walid* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung.

Sedangkan anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan dari kedua.¹⁹ Selain itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia masih kecil.²⁰ Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh orang tua. Sebagai orang tua harus menjaga sebaik mungkin amanah yang Allah berikan. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa

¹⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum pidana* (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 26.

¹⁹Nanda Yunisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Victory Inti Cipta, 2017), h. 51.

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.2.

dilangkan oleh siapapun itu. Masa pertumbuhan dan perkembangan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok yang butuh bantuan, bimbingan, pengarahan dan pengawasan dari orang tua untuk mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan bertambahnya usia sang anak. Akan tetapi fenomena kelalaian orang tua dan penelantaran anak merupakan sesuatu masalah yang sering terjadi didalam masyarakat.

Anak adalah subjek hukum dan masa depan keluarga, masyarakat dan negara yang perlu dilindungi, dipelihara, dan ditumbuhkembangkan untuk mencapai kesejahteraan. Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Batasan ini tentunya memberi pengaruh kepada corak pemikiran dan tindakan anak, mereka dianggap belum dapat membedakan antara persoalan yang baik dan buruk. Untuk memahami makna anak sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosial dan hukum yaitu sebagai berikut:²¹

a. Pengetian Anak dari Aspek Agama

Dalam perspektif agama (syariah), anak merupakan makhluk lemah dan mulia, yang keberadaannya adalah kuasa dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Dalam pengertian islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, kepada masyarakat, bangsa dan negarayang kelak akan memakmurkan duani sebagai *rahmatan lil*

²¹Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komesial* (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014), h. 25-35.

a'lam dan sebagai pewaris ajaran islam. Batasan mengenai pengertian anak yang belum dewasa tidak didasarkan kepada segi umur, tetapi karena terdapat tanda-tanda perubahan fisik (*akil baliq*), baik pada anak perempuan mau pun anak laki-laki.

b. Pengetian Anak dari Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non-produktif. Jika terdapat kemampuan yang mempersif pada kumpulan anak, itu karena mereka telah mengalami transformasi keuangan yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah kepada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang didefinisikan oleh UU nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

c. Pengetian Anak dari Aspek Sosiologi

Dari segi sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah kepada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Sebagai contoh, terbatasnya kemajuan anak karena mereka berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi sebagai akibat daripada umur yang belum dewasa.

d. Pengetian Anak dari Aspek Hukum

1) Pengertian Anak Menurut UUD 1995

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2) Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak Anak (CRC)

Menurut Konvensi ILO Nombor 182, yang menyatakan bahwa anak ialah mereka yang berumur dibawah 18 tahun. Dalam CRC pasal 1 menyebutkan, anak ialah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa umur dewasa dicapai lebih awal.

Pada dasarnya anak merupakan penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara mereka harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas dan berbudi pekerti luhur yang baik serta terpuji.

Didalam al-Qur'an telah di terangkan 4 macam tipe anak dalam hubungannya dengan orang tuanya, yaitu:

- a. *Fitnatun* (ujian)
- b. *Zinatun Hayat* (Perhiasan Dunia)
- c. *Qurrota A'Yun* (Penyejuk Hati)
- d. *Aduwwun* (musuh)

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

- a. Perspektif Hukum Positif

Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks yang menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama. Dalam pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”²² Bahkan dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah jelas dicantumkan tentang kewajiban dan tanggungjawab orang, yaitu: (a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b) Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) Mencegah terjadinya perkawinan diusia dini;²³ dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai pakerti pada anak.²⁴

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui terjadinya perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan,yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.²⁵

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*

²³Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komesial*, (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014), h. 49-50.

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*

²⁵Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 12.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.²⁶ Bismar Siregar mengatakan bahwa “ Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu sosial, ekonomi dan budaya.”²⁷ Selain itu, anak juga perlu mendapat perlindungan karena rentan menjadi korban tindak pidana. Kerentanan itu terjadi karena anak masih tergolong lemah dari segi fisik, keterbatasan pemikiran dan pengetahuan sehingga orang tua harus lebih dalam melakukan pendekatan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan terhadap anak.

b. Perspektif Hukum Islam

Peran agama dalam perlindungan anak sangat diperlukan. Yang dimana anak itu menjadi perhatian yang penting dalam agama. Misalnya, Al-Qur'an telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, karenanya dilarang untuk membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun.

²⁶Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)* (Bandung: Refika Aditama), h. 43.

²⁷Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 22.

Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik atau *qaula karima*. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran. Apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar tanpa terkendali. Perkataan kasar dan hardik tidak disenangi anak, walaupun menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan anak bahwa kata-kata yang tidak lembut merupakan bukti ketidaksenangan orang tua terhadapnya.²⁸ Melalui kata yang baik, bijak dan penuh dengan pujian, anak akan merasa dihargai keberadaannya. Maka orang tua dalam mendidik tidak boleh memandang dari sudut pandangnya saja tetapi dalam mendidik dan mengarahkan anak orang tua harus berusaha memposisikan dalam sudut pandang anak jika tidak akan terjadi ketegangan yang mengakibatkan anak menangkap perkataan orang tua.

3. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban Anak

Dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.”²⁹ Untuk memenuhi pemenuhan hak anak tersebut maka dari itu “Negara, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan

²⁸Irawati Istadi, *Mendidik Dengan Cinta* (Jakarta: Pustaka Inti, 2003), h. 11.

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*

kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental” (UU Perlindungan Anak pasal 21 ayat 1).³⁰

Peran orang tua dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak anak menjadi bagian penting. Berikut ini beberapa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak dalam Undang-Undang perlindungan anak, yaitu:

- a. Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya; c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”³¹
- b. Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:³²
 - 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
 - 2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- c. Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:³³
 - 1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*

³¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*

³²Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*

³³Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*

- 2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.

d. Kewajiban anak

- 1) Kewajiban pada diri sendiri, menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan, menuntut ilmu demi kemajuan dan perkembangan diri, menjaga diri segala bentuk perbuatan asosial, dan kewajiban kepada orang tua atau keluarga.
- 2) Kewajiban kepada orang tua, menyayangi, patuh, hormat, santun dalam berbicara serta menjaga komunikasi dengan baik.
- 3) Kewajiban anak terhadap masyarakat, menjaga perlakuan dan pergaulan sesuai aturan dan norma yang berlaku dan menolong mereka yang memerlukan, menghargai setiap orang.

C. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.³⁴

³⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:³⁵

a. Pembunuhan Sengaja (*and*)

adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang pandang layak untuk membunuh.

b. Pembunuhan Tidak Sengaja (*khata*)

adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

c. Pembunuhan Semi Sengaja (*syibu al-amdi*),

adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

- a. Dasar hukum sanksi pembunuhan didalam Al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ

³⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

بِإِحْسَنِ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Terjemahannya:

“ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah/2: 178)³⁶

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَقٌ فِدْيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٩﴾

وَمَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ۖ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٨٠﴾

Terjemahannya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman,

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h. 27.

Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS An-Nisaa’/4: 92-93)³⁷

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالسِّنِّ وَاللِّسْنَ بِالْجُرُوحِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٣﴾

Terjemahannya:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah/5: 44)³⁸

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا
تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾



Terjemahannya:

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu

³⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h. 93.

³⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h. 115.

karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[518]". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)." (QS. Al-An'am/6: 151)³⁹

b. Dasar hukum sanksi pembunuhan didalam hadits adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

Artinya:

2134-2664. Dari Abdullah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Perkara yang pertama kali diadili pada manusia di hari Kiamat kelak adalah masalah pembunuhan" Shahih: Ash-Shahihah (1748). HR. Bukhari-Muslim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

Artinya:

2135-2665. Dari Abdullah. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang dibunuh secara keji, melainkan dosa pembunuhan tersebut juga akan ditimpakan kepada anak laki-laki pertama dari Nabi Adam AS, karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan tersebut."" Shahih: At-Ta'liq Ar-Raghib (1/48). HR. Bukhari-Muslim.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حَقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ

Artinya:

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h. 148.

2142-2675. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa membunuh secara sengaja, maka ia diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Apabila mereka menginginkan, maka mereka bisa membunuh atau mengambil diyat, sejumlah tiga puluh unta hiqqah (unta yang berusia empat tahun), tiga puluh unta jad'ah (unta berusia lima tahun), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang mengandung). Itulah diyat pembunuh yang disengaja dan apa yang mereka damaikan merupakan keuntungan bagi mereka. dan itu demi memperberat sanksi diyat pembunuhan. " Hasan: ,Al-Irwa'(2199).

D. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

Pembunuhan secara etimologi adalah menyebabkan seseorang mati dan pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain.⁴⁰ Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari beberapa pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

⁴⁰Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 569.

a. Pembunuhan Biasa (pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”⁴¹ Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁴² Dari unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

1) Unsur subjektif, yaitu perbuatan dengan sengaja.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

2) Unsur objektif, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

“Menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya

⁴¹Republik Indonesia, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 569.

⁴²Republik Indonesia, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 569.

pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Selain itu, berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

b. Pembunuhan dengan Pemberatan

Hal ini diatur dalam pasal 339 KUHP yang berbunyi: Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selma-lamanya dua puluh tahun.⁴³ Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk melmpersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Unsur-unsur dari tindak

⁴³Republik Indonesia, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 569.

pidana dengan keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif, yaitu dengan sengaja dan dengan maksud.
- 2) Unsur objektif, yaitu:
 - a) Menghilangkan nyawa orang lain
 - b) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
 - c) Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan
 - d) Untuk menjamin tidak dapat dipidanya diri sendiri atau lainnya dalam tindak pidana yang bersangkutan.
 - e) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasanya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

b. Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁴⁴ Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

⁴⁴Republik Indonesia, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 569.

2) Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

c. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:
 “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa, diancam karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”⁴⁵ Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (motief), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.

d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:
 “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”⁴⁶ Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan

⁴⁵Republik Indonesia, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 570.

⁴⁶Republik Indonesia, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 570.

mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

e. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁴⁷ Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

f. Penganjuran Agar Bunuh Diri

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”⁴⁸

⁴⁷Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 570.

⁴⁸Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 570.

g. Pengguguran Kandungan

Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh pasal-pasal 346,347,348 dan 349.⁴⁹ Ada tiga unsur atau faktor pada kasu pengguguran kandungan, yaitu jaini, ibu yang mengandung dan orang ketiga yaitu yang terlibat dalam pengguguran tersebut.

h. Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandungnya

Hal ini diatur oleh Pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut:⁵¹

- a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.
- b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

⁴⁹Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 570-572.

⁵⁰Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 571.

⁵¹Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 569.

- c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- g. Pengancuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku pengancuran diancam dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.
- h. Pengguguran kandungan:
 - 1) Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
 - 2) Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan lima belas tahun, jika perempuan itu mati.
 - 3) Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun enam bulan dan tujuh tahun, jika perempuan itu mati.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* kualitatif lapangan, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.¹ Penelitian ini, menggambarkan tentang upaya-upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak serta upaya penanggulangannya dan ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini memilih lokasi pada Kepolisian Resort Kabupaten Gowa, dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu Normatif Syar'i dan Yuridis.

1. *Normatif Syar'i* adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw yang berkaitan dengan

¹Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Pres, 1984), h.10.

masalah yang diteliti.

2. *Yuridis* yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa dengan kegiatan pengumpulan data primer dan data sekunder.

- 1) Data Pustaka, yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan

mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang dipandang ada kaitannya dengan obyek penelitian yang dijadikan pembahasan. *Library Research* adalah berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan dari buku-buku peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya.

- 2) Data Lapangan, yaitu data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview, berarti kegiatan aktif langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab kepada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera.²
2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang ada di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa, seperti

²Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.

³Esterbg, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 97.

tulisan yang berupa peraturan serta gambar atau foto sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang dianggap penting.
3. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka dapat meningkatkan keabsahan akan lebih terjamin.
4. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan. Penggunaan *tape recorder* dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data sekunder, lalu diklarifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

1. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data tertulis
2. Proses data dengan cara memilah-milah data, sebagai berikut:
 - a. Koding Data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian, kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan masalah dengan cara memberi kode-kode tertentu pada data tersebut
 - b. Editing Data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan kesahihan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan
3. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang sebelumnya telah dikategorikan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahannya data penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan dengan sumber data lainnya, misalnya; triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori.⁴ Tetapi triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.

⁴Junaidi Ghony & Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 322-323.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa, tepatnya di Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Bontomarannu.

1. Gambaran Umum Kepolisian Sektor (Polsek) Bontomarannu

Kepolisian Sektor (Polsek) sebagai kewilayahan Polri terdepan, mempunyai nilai atau posisi strategis sebagai ujung tombak dalam pembinaan Kamtibmas yang secara langsung menyentuh masyarakat, karena titik awal dari penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat di Polsek, maka fungsi deteksi merupakan fungsi kesatuan dan penyelenggaraannya menjadi kewajiban serta tanggung jawab pimpinan Polsek (Kapolsek).

Kedudukan dan posisi Kepolisian Sektor (Polsek) sebagai ujung tombak Kepolisian, apabila dikaitkan dengan kebijakan Kapolri di bidang operasional yaitu mengutamakan tindakan preemtif dan preventif, maka Polsek diharapkan secara dini, mengidentifikasi segala permasalahan ditengah-tengah masyarakat sehingga mampu berperan dalam memberikan peringatan dini pimpinan dan penciptaan kondisi yang menguntungkan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan pada umumnya.

Sehubungan dengan peran tersebut, Polsek dituntut dapat melaksanakan tugas deteksi melalui kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan informasi untuk pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) secara lengkap. Polsek Bontomarannu merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Gowa dan

merupakan salah satu elemen pelaksana utama kewilayahan Polres Gowa serta merupakan perpanjangan tangan dari POLDA Sulawesi Selatan ditingkat kecamatan. Kepolisian Sektor (Polsek) Bontomarannu berfungsi menyelenggarakan tugas-tugas pokok POLRI dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum meliputi seluruh wilayah administrasinya. Yang dimana bagian sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Maros, sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Pallangga, sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Somba Opu. Dan sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Manuju dan Kec. Prangloe.

Adapun tugas Polsek Bontomarannu Gowa secara umum sebagai suatu instansi penegak hukum yang bekerja dibawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan :

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan merintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban

dan kelancaran lalu lintas di jalan

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Turut dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
- 8) Menyenggarakan indentifikasi Kepolisian, Kedokteran, Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga Masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas Kepolisian.

- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

a. Letak Geografis

Kepolisian Sektor (polsek) Bontomarannu Kabupaten Gowa terletak di jalan Poros Malino No.60 balang-Balang, tepatnya disamping KORAMIL. Secara administratif kecamatan Bontomarannu terdiri dari 7 (tujuh) Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 52,63 Km², 23 Dusun/lingkungan, 57 RW/RK dan 131 RT. Desa/Kelurahan dengan luas area terbesar yaitu kelurahan Ramangloe 14,72 Km² sedangkan terkecil berada pada Desa/Kelurahan Nirannuang 2,47 Km². Pada bangunan Polsek Bontomarannu terdiri dari beberapa ruangan yaitu:

- 1) Ruangan Kapolsek
- 2) Ruangan Kanit Provos dan Wakapolsek
- 3) Ruangan Kasium
- 4) Ruangan SPKT
- 5) Ruangan Kanit Sabhara
- 6) Ruangan Kanit Intelkan
- 7) Ruangan Kanit Reskrim
- 8) Ruangan Kanit Binmas
- 9) Ruangan pemeriksaan
- 10) Ruangan sel tahanan
- 11) 2 toilet
- 12) Tempat Parkir

b. Visi dan Misi

1) Visi Polsek Bontomarannu Gowa

Terwujudnya polisi yang semakin profesional, modern, dan terpercaya guna mendukung terciptanya kota Makassar, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong

2) Misi Polsek Bontomarannu Gowa

- a) Berupaya melanjutkan reformasi internal polisi
- b) Mewujudkan organisasi dan postur polisi yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern
- c) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia polisi yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM
- d) Peningkatan kesejahteraan anggota polisi.
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan terhadap publik
- f) Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
- g) Meningkatkan harkamtimas dengan mengikut sertakan publik melalui sinergitas polisional.
- h) Mewujudkan penegak hukum yang profesional dan berkeadilan.

c. Peran dan Bidang-Bidang Kerja Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi yang ada pada Polsekta Bontomarannu, maka peran dan bidang-bidang kerjanya sebagai berikut :

1) Kapolsek Bontomarannu

Dipimpin oleh AKP Robert Naro, berperan sebagai pimpinan/atasan pada Polsekta Bontomarannu, yang melakukan koordinasi dengan bawahan serta bertanggung jawab terhadap segala program kerja/tugas yang ada.

Bidang kerjanya meliputi:

- a) Sebagai unsur pelaksana dari satuan atas, baik dibidang operasional maupun pembinaan.
- b) Melakukan koordinasi dengan bawahan serta bertanggung jawab terhadap segala program kerja /tugas yang ada.
- c) Mengkoordinasi perintah/kebijaksanaan pimpinan satuan atas yang secara langsung ditujukan kepada unsur pelaksana.
- d) Menyampaikan permasalahan yang menyangkut kewenangan satuan atas, baik bersifat lokal maupun nasional.
- e) Menyampaikan laporan pelaksana tugas baik rutin maupun insedentil, terutama masalah-masalah yang menjadi atensi pimpinan.
- f) Memberikan Back Up Operasional kepada bawahan termasuk bantuan teknis maupun dukungan administrasi.

2) Kasium

Dikepalai oleh AIPTU Rahmat T, berperan dalam melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam yang meliputi korespondensi, pengarsipan, dokumentasi, menyelenggarakan rapat, apel / upacara, kebersihan dan ketertiban markas komando(mako). Bidang-bidang kerjanya meliputi :

- a) Melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, pengarsipan, dokumentasi, menyelenggarakan, rapat, apel / upacara, kebersihan dan ketertiban markas komando.
 - b) Menerima semua surat masuk, memeriksa, mengklarifikasikan selanjutnya dibuat agenda.
 - c) Juru agenda melampiri surat-surat dengan lembaran disposisi dan dimasukkan dalam buku agenda sesuai dengan derajatnya (“R” untuk surat rahasia dan “B” untuk surat biasa).
 - d) Membuat rencana kegiatan harian, mingguan dan bulanan.
 - e) Membuat program hasil kegiatan harian, mingguan dan bulanan.
 - f) Membuat program kegiatan tahunan.
 - g) Membuat LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan POLRI) yang dilaporkan perbulan, triwulan, caturwulan, semester dan tahunan.
 - h) Membuat PERWAKTU (Pertanggungjawaban Keuangan Operasional).
- 3) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

Unit ini berperan untuk memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan / pengaduan, pelayanan permintaan bantuan / pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Polsekta Bontomarannu dan

penyelesaian perkara ringan / perselisihan antar warga sesuai ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan dalam organisasi Polri. Dalam melakukan tugasnya SPKT banyak berkoordinasi dengan Unit Patroli. Bidang-bidang kerjanya meliputi :

- a) Memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan masyarakat, pelayanan permintaan bantuan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Polsek Bontomarannu.
- b) Pelaksanaan tugas sehari-hari bersama dengan fungsi operasional yang terkait dan hasil pelaksanaan tugasnya dilaporkan ke Kapolsekta melalui Kanit Patroli.
- c) Pelayanan tugas pada Sentral Pelayanan Kepolisian dibawah kendali Kanit Patroli namun bertanggung jawab langsung kepada Kapolsek.

4) Intelejen dan Keamanan (Intelkam)

Dipimpin oleh IPDA Umar sebagai Kanit Intelkam. Unit Intelkam berperan sebagai penyelidik atau pengumpul informasi dan berkoordinasi langsung dengan fungsi-fungsi lain, dimana bidang-bidang kerjanya meliputi penyamaran baik penyamaran nama, pekerjaan dan sikap yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bidang-bidang kerjanya meliputi :

- a) Membina fungsi Intelejen dibidang keamanan termasuk persandian dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang

menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat, dan surat keterangan rekaman kejahatan (SKCK/criminal record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

- b) Membuat kegiatan deteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman kamtibmas, melaksanakan giat pengamanan dan penggalangan serta memberikan masukan kepada fungsi-fungsi operasional lainnya yang berkaitan tugas masing-masing fungsi.
- c) Melakukan pengawasan, perlindungan, pengamanan, dan penindakan terhadap orang asing yang melakukan kejahatan/pelanggaran sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan berkoordinasi fungsi Reskrim dan fungsi operasional lainnya.
- d) Melaksanakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi tumbuh dan berkembangnya aliran dalam kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa, bekerja sama dengan Binamitra dalam rangka penyuluhan masyarakat dan fungsi Reskrim untuk penindakan.
- e) Mencegah timbulnya police hazard (kerawanan polisi) dengan melakukan penyidikan terhadap faktor-faktor korelatif kriminogen diberbagai aspek kehidupan sebagai masukan bagi pelaksanaan tugas fungsi Samapta dan Binamitra.
- f) Melakukan pengawasan terhadap pengadaan, pemasukan, pengeluaran, pengangkatan, penyimpanan dan penggunaan bahan peledak, amunisi

dan senjata api non organik militer berkoordinasi dengan fungsi Samapta dan Reskrim dalam hal penyimpangan izin yang dikeluarkan.

- g) Menyiapkan kirka intel (perkiraan intelejen) dalam rangka pelaksanaan operasional khusus kepolisian, mendinamisir operasional dalam hal yang diperlukan perubahan sasaran, mengamankan jalannya operasi dari gangguan pihak lawan, maupun penyimpangan dari pelaksanaan operasi melalui operasi bersih.
- h) Melaksanakan administrasi intelejen termasuk pemuktakhiran data dalam rangka menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, tepat guna sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.

5) Reserse dan Kriminal (Reskrim)

Dipimpin oleh IPDA John Gph Hayr sebagai kepala unit reserse dan kriminal yang berperan dalam menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Reserse Kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana yang meliputi reserse umum, ekonomi, narkoba, uang palsu dan dokumen palsu koordinasi PPNS dan tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi dan pengelolaan Pusat Informasi Kriminal. Bidang-bidang kerjanya meliputi :

- a) Menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan

koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kapolsek.

- b) Menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat yang diterima oleh SPK dengan melaksanakan upaya penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan penyidikan tindak pidana.
- c) Memberikan masukan kepada fungsi Intelkam dalam hal yang diperlukan pengembangan hasil sidik/lidik dalam upaya mengungkap jaringan kejahatan khususnya yang berkaitan dengan kejahatan yang meresahkan masyarakat.
- d) Memberikan masukan kepada bagian Babinkamtibmas dalam hal diperlukan data/informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas Binmas terutama yang menyangkut kerawanan daerah modus operandi pelaku dan anatomi kriminalitas lainnya guna meningkatkan daya tangkal masyarakat dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas.
- e) Melakukan kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data secara terus menerus dalam rangka penyajian data yang akurat guna kepentingan operasional Kepolisian maupun untuk kepentingan penyajian informasi kriminalitas bagi fungsi-fungsi yang terkait memerlukannya.
- f) Melakukan kegiatan identifikasi terhadap para pelaku kejahatan, barang bukti dan menginformasikan kepada fungsi terkait lainnya dalam upaya pengenalan terhadap pelaku dan barang bukti bagi

petugas lain yang berada di luar fungsi Reskrim untuk tindakan-tindakan Kepolisian yang diperlukan.

- g) Melakukan kegiatan pengamanan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana orang-orang yang sedang ditahan untuk kepentingan penyidikan termasuk pengamanan terhadap barang bukti, barang temuan maupun barang sitaan berkoordinasi dengan fungsi samapta dan bagian operasional.

6) Binmas

Dipimpin oleh AIPTU Darsho I sebagai kanit Binmas. Ini merupakan perpanjangan tangan dan komunikasi antara warga dan kepolisian. Berperan sebagai Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, kesadaran tentang Kamtibmas di desa/kelurahan. Serta Pelindung dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa tentram di masyarakat. Bidang-bidang kerjanya meliputi :

- a) Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum, upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat desa/kelurahan.
- b) Melakukan tugas-tugas Kepolisian Umum dalam hal-hal tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, yaitu mengumpulkan bahan keterangan, mengamankan kegiatan-kegiatan masyarakat dan menerima laporan serta pengaduan masyarakat.
- c) Penanganan tingkat pertama kejahatan, pelanggaran atau kecelakaan di tempat kejadian perkara.

- d) Melaksanakan tugas-tugas dibidang pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dan masyarakat setempat.

d. Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bontomarannu Gowa

1) Administrasi Kecamatan Pattallassang

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) Desa Panaikang | e) Desa Timbuseng |
| b) Desa Palantikang | f) Desa Sunggumanai |
| c) Desa Pattallassang | g) Desa Paccelelang |
| d) Desa Borong Pala'la | h) Desa Jeneminggiong |

2) Administrasi Kecamatan Bontomarannu

- | | |
|--------------------|----------------------|
| a) Desa Bili-bili | e) Desa Nirannuang |
| b) Desa Bontomanai | f) Desa Pakatto |
| c) Desa Borongloe | g) Desa Romangloe |
| d) Desa Mata Allo | h) Kel. Romang Lompo |

e. Profil Pegawai Bapas Kota Makassar

Adapun profil personil Polsek Bontomarannu Gowa dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Profil personil Polsek Bontomarannu Gowa

No.	N A M A	PANGKAT / NRP	JABATAN	KET
1	ROBERT NARO	A K P/62100601	KAPOLSEK	
2	SYAHRIR, SH	I P T U/74040474	WAKAPOLSEK	
3	JAMALUDDIN	A I P T U/76070644	KA SPKT 1	
4	ABDUL KARIM	BRIPKA/82081269	BAYANMAS SPK 1	
5	MUSTAKIM	A I P T U/74020493	KA SPKT 2	
6	MUH. ILYAS	BRIPKA/ 81100284	BAYANMAS SPK 2	
7	PARDEMUANG L.	A I P T U/61080339	KA SPKT 3	
8	A N S A R	BRIPKA/83011109	BAYANMAS SPK 3	
9	SAINAL ARIFIN	A I P D A/77120558	KANIT PROVOS	
10	HERU SETIAWAN	BRIPKA/84060500	BA PROVOS	
11	CHOIRUL ANAM	A I P T U/74030162	KASI HUMAS	

12	RAHMAT T.	A I P T U/72100111	KASIUM	
13	WAWAN PRASTYO, S.Psi	BRIGADIR/86111261	BA URMIN	
14	M A N N A N	I P D A/62100739	KANIT SABHARA	
15	RUDI ALI MARHAM, S.Sos	PENGATUR/ 196911121998031007	STAF SABHARA	
16	SUPARMAN	A I P D A/79040345	KA JAGA RU. 1	
17	AMIR HAMZAH	BRIGADIR/87101085	JAGA RU. 1	
18	JEREMIA. A. LOLO	A I P T U/70050313	KA JAGA RU. 2	
19	ARFAH MUNANDAR	BRIPKA/85030296	JAGA RU. 2	
20	MUH. SYAHRIR	A I P D A/78060854	KA JAGA RU. 3	
21	MUSLIMIN	BRIGADIR/86041562	JAGA RU. 3	
22	JOHN GPH HAYR	I P D A/64020370	KANIT RESKRIM	
23	FRANSISKUS SONY, ST	BRIGADIR/84021505	MINDIK RESKRIM	
24	SUHARDI RABASING, SH	AIPDA/79061199	BA RESKRIM	
25	A N W A R	BRIPKA/80070890	BA RESKRIM	
26	G U S M A N	BRIPKA/81119437	BA RESKRIM	
27	YOSEF RERUNG	BRIPKA/82090520	BA RESKRIM	
28	U M A R	I P D A/78050819	KANIT INTEL	
29	ARRAHMAN SUTIKNO	BRIPKA/84011050	BA INTELKAM	
30	UDIN MADDOLORANG	BRIGADIR/86101133	BA INTELKAM	SKCK
31	DHARSO IMANULLAH	A I P T U/65010242	KANIT BINMAS	
32	MUH. NASIR ASIS, S.Ag	A I P T U/65010680	BHABIN	KEL. BORONGLOE
33	M O L L E	BRIPKA/77051059	BHABIN	DESA SOKOLIA
34	MUH. NUR AHSAN	BRIPKA/79121052	BHABIN	DS. ROMANGLOE, BIL2
35	MUH. NATSIR	BRIPKA/71020191	BHABIN	DESA MATA ALLO
36	S U A I B, SH	BRIPKA/82051417	BHABIN	KEL. BONTOMANAI
37	A S R U L	BRIPKA/83111038	BHABIN	KEL. ROMANG LOMPOA
38	A S ' A D	BRIGADIR/79051253	BHABIN	DESA NIRANNUANG
39	ANDI S. ALWI	BRIPKA/79071451	BA POLMAS	DESA SUNGGUMANAI
40	MUH. YUSUF AKBAR	BRIGADIR/79051211	BA POLMAS	DESA PAKATTO
41	R I C H S A N	BRIGADIR/86020638	BA POLMAS	DESA JENE MADINGIN

(Sumber: Kasium Polsek Bontomarannu Gowa)

B. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan terhadap Anak oleh orang tua kandung

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 31 Juli 2018 dengan Bripka Yosef Rerung¹ maka diperoleh informasi mengenai kronologi terjadinya pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung di Polsek Bontomarannu Gowa. "Pada hari rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 18.30 wita, pelaku alias ayah korban alias Ramli kembali ke rumahnya dalam keadaan mabuk setelah mengkomsumsi minuman keras jenis ballo. Setelah tiba di rumahnya, pelaku meminta kepada istrinya yaitu Kasturi untuk dibuatkan kopi. Karena kompor

¹Bripka Yosef Rerung (37 tahun), Banit Reskrim Polsek Bontomarannu Gowa, 31 Juli 2018.

gasnya habis, saudari Kasturi memasak air di rumah tetangganya, sedangkan pelaku baring-baring di kamar tidur bersama dengan anaknya yaitu Alm (Alfaidil) yang masih berusia 5 bulan yang saat itu di atas ayunan. Karena anaknya terus menangis, pelaku alias ayah korban tersebut menjadi terganggu, emosi dan marah sehingga pelaku langsung berdiri dan menggoyang ayunan anaknya. Karena anaknya tidak berhenti menangis akhirnya tanpa berpikir panjang pelaku langsung menendang ayunan anaknya alias korban. Yang dimana tendangan pertama mengenai bantal yang menjadi alas ayunan korban. Pada saat ayunan tersebut di tendang pelaku membuat ayunan itu terpental keatas. Karena anaknya masih menangi, pelaku kemudian menendang kembali ayunan korban yang dimana mengenai bagian kepala bawah. Pada saat itu korban langsung berhenti menangis. Pada saat bersamaan Kasturi ibu korban langsung mengambilnya anaknya dan membawanya ke Rumah Sakit tetapi setelah tiba di Rumah Sakit, Dokter pemeriksa mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia.”

Bripka Yosef Rerung² juga mengemukakan bahwa dalam menangani kasus ini Bripka Yosef Rerung³ menggunakan pasal 80 (3 dan 4) UU No. 35 th 2014 tentang Perlindungan anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

²Bripka Yosef Rerung (37 tahun), Banit Reskrim Polsek Bontomarannu Gowa, 31 Juli 2018.

³Bripka Yosef Rerung (37 tahun), Banit Reskrim Polsek Bontomarannu Gowa, 31 Juli 2018.

- (2) Dalam hal Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Dari informasi kronologi kejadian peristiwa pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung di Bollangi tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa faktor penyebab terjadinya pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung :

1. Mengonsumsi minuman keras

Seperti yang diketahui bersama bahwa minuman keras adalah minuman yang dapat menutup pikiran dan merupakan akar dari semua tindak kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri sana orang lain atau orang sekitar yang membuat seseorang menyesali perbuatannya. Seseorang yang kehilangan kesadaran tidak pernah berpikir panjang akibat yang ditimbulkan setelah melakukan tindak kejahatan. Yang ada hanya penyesalan ketika telah sadar bahwa dampak dari perbuatannya itu berakibat fatal untuk dirinya bahkan orang sekitarnya.

2. Faktor lingkungan

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Seseorang selain berinteraksi dengan keluarganya juga memasuki lingkungan pergaulan yang lebih luar yaitu lingkungan pergaulan dalam masyarakat. Pergaulan ini menjadi penting untuk membentuk karakter dan mental seseorang. Bripka Yosef Rerung⁴ menjelaskan bahwa 60 % perilaku seseorang terpengaruh oleh lingkungan luar ataupun pergaulannya. Seperti pergaulan yang salah, yang awalnya memiliki kepribadian baik namun dia bergaul di lingkungan yang salah akhirnya mengakibatkan dia terjerumus.

3. Faktor Agama

Kurangnya pemahaman dalam agama bahwa perlunya membina dan membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahma*. Menjadi kepala keluarga yang seharusnya menjadi pemimpin dan pelindung keluarganya akan tetapi malah sebaliknya.

C. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam menyelidiki kasus pembunuhan terhadap Anak oleh orang tua kandung

Bripka Yosef Rerung⁵ Dalam melakukan tugasnya Reskrim melakukan tugasnya yaitu:

1. Penyelidikan

⁴Bripka Yosef Rerung (37 tahun), Banit Reskrim Polsek Bontomarannu Gowa, 31 Juli 2018.

⁵Bripka Yosef Rerung (37 tahun), Banit Reskrim Polsek Bontomarannu Gowa, 31 Juli 2018.

Kegiatan ini untuk mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan atau pengaduan tentang benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana, dan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan tentang tersangka atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penyidikan. Sasaran penyelidikan adalah orang, benda/barang dan tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup). Pelaksanaan penyelidikan berdasarkan wewenang menurut KUHP, antara lain menerima laporan/pengaduan, meneliti laporan/pengaduan, kemudian melakukan tindakan penyelidikan.

2. Penyidikan

- a. Penindakan
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Pengeledahan
- e. Penyitaan
- f. Pemeriksaan

Dari hasil wawancara dengan Bripka Yosef Rerung⁶, beliau mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya mengangani kasus pembunuhan selama jadi penyidik di Polres Bontomarannu Gowa. Akan tetapi berbeda dengan kasus pembunuhan yang dimana hubungan korban dan pelaku itu sendiri adalah Ayah dan anak kandung. Penyidik memiliki waktu 20 hari + 40 hari untuk melimpahkan ke Kejaksaan dan apabila belum rampung bisa ditambahkan 30 hari + 30 hari.

Adapun hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi penyidik

⁶Bripka Yosef Rerung (37 tahun), Banit Reskrim Polsek Bontomarannu Gowa, 31 Juli 2018.

dalam menyelidiki kasus tersebut adalah:

1. Mencari keberadaan pelaku yang biasanya melarikan diri setelah melakukan pembunuhan.
2. Kurangnya kesadaran hukum warga terkait dengan tidak dapatnya dipungkiri, warga mengelak dimintai keterangan sebagai saksi. Berbagai alasan akan mereka kemukakan untuk menolak menjadi saksi, yang dumana pada umumnya mereka enggan menjadi saksi karena takut adanya intimidasi berupa ancaman fisik atau psikis terhadap saksi itu sendiri.
3. Dalam memberikan keterangan saksi-saksi bersifat tertutup.
4. Keterangan pelaku yang sering berubah-ubah.
5. Kurangnya pengetahuan warga tentang pentingnya olah TKP.

Melihat hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik maka perlu ditingkatkan sosialisasi terhadap warga tentang pentingnya keterbukaan menjadi saksi dalam memberikan informasi kepada penyidik mengingat proses memperoleh keterangan dari saksi merupakan bagian penting dalam penyelidikan tersebut maka dibutuhkan kerja sama dengan warga. Selain itu pihak penegak hukum harus memberi pemahaman dan menyakinkan saksi tentang perlindungan saksi sehingga warga tidak takut ketika dimintai keterangan menjadi saksi agar proses penyelidikan juga berjalan lancar.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Kandung

Meminum minuman keras telah hukumnya didalam al-Qur'an adalah haram dan merupakan induk dari segala perbuatan keji.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

‘Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.’ (Qs al-Maidah/5:90)⁷

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا
مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Artinya:

2733-3434. Dari Abu Darda' RA, ia berkata, "Kekasihku (Nabi SAW) mewasiatkan kepadaku, 'Janganlah kamu meminum khamer, karena ia adalah kunci segala kejahatan'." Shahih: Shahih Al Jami' (7211), At-Ta'liq Ar-Raghib (1/196).

Salah satu kejahatan yang di timbulkan akibat meminum minuman keras adalah pembunuhan, padahal tindak pembunuhan dilarang didalam islam. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَقٌ فِدْيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢١٧﴾

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h. 123.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ

عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Terjemahannya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman, Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS An-Nisaa’/4: 92-93)⁸

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دَفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ
ثَلَاثُونَ حَقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ
لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ

Artinya:

2142-2675. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa membunuh secara sengaja, maka ia diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Apabila mereka menginginkan, maka mereka bisa membunuh atau mengambil diyat, sejumlah tiga puluh unta hiqqah (unta yang berusia empat tahun), tiga puluh unta jad'ah (unta berusia lima tahun), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang mengandung). Itulah diyat pembunuh yang disengaja dan apa yang mereka damaikan merupakan keuntungan bagi mereka. dan itu demi memperberat sanksi diyat pembunuhan. " Hasan: ,Al-Irwa'(2199).

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h. 93.

Dari ayat dan hadist diatas sangat tegas Allah swt mengharamkan minuman keras karena dapan menghilangkan kesadaran dan merupakah induk dari perbuatan keji. Salah satunya adalah pembunuhan, seperti yang terjadi pasa kasus pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung di Bollangi. Maka dari itu sebaiknya jauhi minuman keras dan lebih selektiflah dalam memilih teman agar tidak muah terjerumus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung , adalah karena
 - a. Efek samping dari meminum minuman keras yang membuat seseorang kehilangan akal, sehingga tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah.
 - b. Faktor lingkungan.
 - c. Faktor agama.
2. Informasi yang diperoleh bahwa hambatan yang dihadapi penyidik dalam menyelidiki kasus pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung adalah:
 - a. Mencari keberadaan pelaku yang biasanya melarikan diri setelah melakukan pembunuhan.
 - b. Kurangnya kesadaran hukum warga terkait dengan tidak dapatnya dipungkiri, warga mengelak dimintai keterangan sebagai saksi. Berbagai alasan akan mereka kemukakan untuk menolak menjadi saksi, yang dumana pada umumnya mereka enggan menjadi saksi

karena takut adanya intimidasi berupa ancaman fisik atau psikis terhadap saksi itu sendiri.

- c. Dalam memberikan keterangan saksi-saksi bersifat tertutup.
 - d. Keterangan pelaku yang sering berubah-ubah.
 - e. Kurangnya pengetahuan warga tentang pentingnya olah TKP.
3. Minuman keras merupakan induk dari seluruh perbuatan keji, salah satunya adalah pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung yang hukum dan sanksinya telah tegas di tentukan dalam al-Qur'an dan Hadist.

B. *Implikasi Penelitian*

1. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi, diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat atau setiap keluarga agar lebih bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, mengingat keluarga harus menciptakan sakinah, mawaddah dan warahman. Selain itu pelunya agar lebih selektif dalam memilih teman dalam bergaul agar tidak terjerumus.
2. Melihat hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik maka perlu ditingkatkan sosialisasi terhadap warga tentang pentingnya keterbukaan menjadi saksi dalam memberikan informasi kepada penyidik mengingat proses memperoleh keterangan dari saksi merupakan bagian penting dalam penyelidikan tersebut maka dibutuhkan kerja sama dengan warga. Selain itu pihak penegak hukum harus memberi pehaman dan menyakinkan saksi tentang perlindungan saksi sehingga warga tidak takut ketika dimintai keterangan menjadi saksi agar proses penyelidikan juga berjalan lancar. Dan kepada aparat penegak hukum

diharapkan agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah dari undang-undang agar anak tidak lagi menjadi korban. Mengingat anak berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga dan Negara.e

3. Dari ayat dan hadist diatas sangat tegas Allah swt mengharamkan minuman keras karena dapan menghilangkan kesadaran dan merupakan induk dari perbuatan keji. Salah satunya adalah pembunuhan, seperti yang terjadi pasa kasus pembunuhan terhadap anak oleh orang tua kandung di Bollangi. Maka dari itu sebaiknya jauhi minuman keras dan lebih selektiflah dalam memilih teman agar tidak muah terjerumus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri" al-Jina"i al-Islami*, Beirut: Muasasah al-Risalah, tt
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ali,Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Achmad, Mustafa Abdullah dan Ruben, *Intisari Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Basri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Esterbg, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002
- Ghony, Junaidi & Almansyur, Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- Gultom, Maidin, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: P.T.Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2010
- Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986
- H. R., Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*, Jakarta: Restu Agung, 2006
- Halim, M Nipan Abdul, *Membahagikan Suami Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra pustaka, 2005
- Istadi, Irawati, *Mendidik Dengan Cinta*, Jakarta: Pustaka Inti, 2003
- Kanang, Abdul Rahman, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komesial*, Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014

- Kanang, Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-hak Konstitusional anak*, Makassar, Alauddin University Press, 2011
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2009
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta: Penerbit Wali, 2012
- Kholiq, M. Abdul, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Inuversitas Islam Indonesia
- Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum pidana*, Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983
- Nanda, Yunisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Victory Inti Cipta, 2017
- P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum*, Grahamedia Press, 2015
- Republik Indonesia, *Undang-Undang perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981

Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, cet: 10, 2011

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2003

Sholihin, M. Firdaus dan Yulianingsih, Wiwin, *Kamus hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Siregar, Bismar, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986

Soekanto, Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Pres, 1984

Togat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008

Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: gramedia wirasarana indonesia, 2000

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan BRIPKA Yosef Rereung, 31 Juli 2018



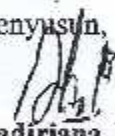


PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

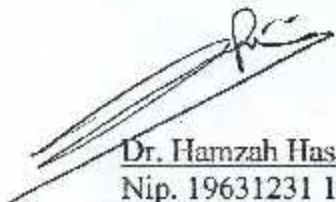
Nomor: /HPK/2017

Judul Skripsi: "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK
OLEH ORANG TUA KANDUNG (STUDI KASUS DI POLSEK
BONTOMARANNI GOWA)"

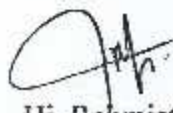
Gowa,
Penyusun,


Fadjriana Burhanuddin
Nim. 10200114191

Pembimbing I



Dr. Hamzah Hasan, M.Hi
Nip. 19631231 199302 1 003

Pembimbing II


Hj. Rahmiati, M.Pd
Nip. 19771005 200901 2 005



Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan


Dra. Nila Sastrawati, M. Si
Nip. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
Nip. 19621016 1990031 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fadriana Burhanuddin, Lahir di Sinjai, 04 Oktober 1995. Saya merupakan anak ke-7 dari 9 bersaudara dari pasangan Burhanuddin S dan ST.Sohrah. Saya mengenyam pendidikan TK Muhammadiyah Makassar, SDN Pongtiku 2 Makassar dan tamat di SDN 23 Sinjai, SMPN 2 Sinjai dan SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin dan tamat di SMAN 3

Sinjai. Sekarang saya seorang mahasiswa di UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Di bangku kuliah saya juga aktif dalam berbagai organisasi ekstra. Saya menjabat sebagai Bendahara umum PMII Cab.Gowa Fakultas Syariah dan Hukum hingga saat ini. Selain itu saya juga aktif di MBH (Mahasiswa Berpendidikan Hukum).